



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

DINAMIKA PROBLEMATIK SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Problematic Dynamics of the Regional Government Bureaucracy System of East Nusa Tenggara Province

Anselmus Leduq

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding email ✉: anselleduq@gmail.com

**Naskah Diterima
29 April 2024**

**Revisi
9 Mei 2024**

**Diterima
10 Mei 2024**

Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of cultures, religions, languages, and customs that stretches widely throughout Indonesia. Seeing that Indonesia is very plural, it is necessary to build a government system to regulate and serve the community or what is called "bureaucracy". Bureaucracy is rationality, professionalism, orderliness, and formality in work relationships. The regional government of East Nusa Tenggara has dynamic problems in the bureaucratic system in its task of serving the community, giving rise to instability in improving human resources and community welfare currently, East Nusa Tenggara Province is one of the poorest and most underdeveloped provinces in Indonesia. Seeing this problem, bureaucratic reform is needed. Bureaucratic reform is the government's effort to improve performance through various means with the aim of effectiveness, efficiency, and accountability. The Rational Administrative Model theory developed by Max Weber became the starting point for renewing and reforming the East Nusa Tenggara government bureaucracy with quality and accountability (good governance).

Keywords: *NTT Bureaucratic Problems, Bureaucratic Reform, Good Governance.*

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, bahasa, adat istiadat membentang luas di seluruh Indonesia. Melihat Indonesia yang sangat plural ini, maka perlu dibangun sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur dan pelayanan masyarakat atau yang disebut “birokrasi”. Birokrasi merupakan sebuah rasionalitas, profesionalisme, keteraturan, formalitas dalam hubungan kerja. Pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika permasalahan dalam sistem birokrasi dalam tugas melayani masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dan juga sampai saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu Provinsi yang termiskin dan terbelakang di Indonesia. Melihat persoalan ini diperlukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Teori Rational Administrative Model yang dikembangkan oleh Max Weber menjadi titik tolak dalam pembaharuan dan reformasi birokrasi pemerintahan Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan akuntabilitas (*good governance*).

Kata kunci: Permasalahan Birokrasi di NTT, Reformasi Birokrasi, *Good Governance*.

Daftar Isi

Abstrak	22
Daftar Isi	23
Pendahuluan	24
Latar Belakang	24
Perumusan Masalah	25
Metode Penelitian	26
Pembahasan	26
Problematika Sistem Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT)	26
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT) Yang Berkualitas Dan Berintegritas (Good Governance)	28
Implikasi Teori Rational Administrative Model Terhadap Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT)	30
Kesimpulan	32
Daftar Pustaka	33



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Anselmus Leduq, "Dinamika Problematika Sistem Birokrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2021): 21-34, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.146>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Leduq, Anselmus. "Dinamika Problematika Sistem Birokrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 21-34, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.146>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang memiliki kedudukan yang strategis dalam pemerintahan baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintahan daerah dan instrumen hukum memiliki kolaborasi dalam mengatur dan memberikan ketertiban bagi masyarakat secara adil dan merata. Indonesia adalah negara yang luas dan berneka ragam dalam hidup kebangsaan, maka birokrasi pemerintahan juga memiliki beragam fungsional dalam mengatur dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan amandemen pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi, dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada Masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan.¹

Pasal 18 ayat (6) dengan jelas mengatakan bahwa pemerintahan daerah diberikan kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan kewenangan dan kedudukan ini menggambarkan posisi penting pemerintahan daerah dalam menjembatani pelayanan public bagi masyarakat dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal yang paling penting adalah birokrasi. Menurut Karl Marx birokrasi merupakan negara atau pemerintahan dalam sebuah organisasi. Ia juga berpendapat bahwa birokrasi adalah alat yang digunakan dalam menjalankan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya.² Birokrasi merupakan struktur organisasi disektor pemerintahan juga merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Max Weber menyatakan bahwa konsep birokrasi adalah kewenangan dari pemimpin sebuah organisasi dalam memaksakan idenya kepada bawahnya untuk dilaksanakan. Legal rasional merupakan dominasi kewenangan yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan berdasarkan seperangkat aturan yang disepakati bersama.³

Sistem birokrasi pemerintahan Nusa Tenggara Timur memiliki kemunduran dalam konsep tugas dan kewenangan dalam pelayanan public. Banyak terjadi kasus-kasus pidana, tindakan korupsi, atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah. Mental birokrasi pemerintahan di Nusa Tenggara Timur juga masih rendah dalam melayani masyarakat karena ketidaksadaran individu dalam bekerja dan melayani masyarakat. Menurut Viktor Laiskodat dalam pertemuan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalabahi, ia mengatakan bahwa masalah utama kegagalan pembangunan di Nusa

¹ Widodo Ekatjahjana, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2022),1.

² Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 39.

³ *Ibid*, 2.

Tenggara Timur adalah “birokrasi”.⁴ Birokrasi yang sangat kaku akan mengakibatkan kelemahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan oleh pemimpin, sehingga struktur birokrat itu sangat penting dan efektif dalam melayani public.

Birokrasi adalah sebuah struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa dalam konsep pembangunan suatu pemerintahan yang efektif dan efisien. Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa adanya birokrasi sebagai pengorganisir suatu pekerjaan agar dilakukan secara teratur dan harus dilakukan oleh beberapa orang. Ia juga mengatakan bahwa birokrasi memiliki tujuan untuk mempermudah dan dijalankan secara baik dan terorganis dalam sebuah pekerjaan.⁵ Birokrasi pemerintahan Nusa Tenggara Timur harus melakukan reformasi dan rekonstruksi dalam bidang pemerintahan terkhusus dalam sistem birokrat. Birokrasi yang berkualitas dan berintegritas dalam pemerintahan (*Good Governance*) adalah pemerintah yang memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan banyak orang.

Melihat permasalahan birokrasi di pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur ini teori Rational Administrative Model menjadi sangat relevan dalam mencari jalan keluar dan mengatasi dinamika problematika birokrasi tersebut. Teori Rational Administrative Model adalah teori yang memiliki konsepsi pemikiran yang berdasarkan pada pelaksanaan dan ketetapan hukum yang netral, bukan pada subjektifitas. Birokrasi model ini memiliki sistem kerja yang terorganisir yang struktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Reformasi birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur menjadi sangat penting dalam melayani dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena Teori Rational Administrative Model menjadi sangat efektif dalam merealisasikan dan penerapan dalam pembangunan birokrasi yang berkualitas dan berintegritas di pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur. Maka, judul tulisan ini adalah “**Dinamika Problematika Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Terjadi Problematik Birokrasi Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. Bagaimana model Birokrasi Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berkualitas dan berintegritas.

⁴ Kornelis Kewa Ama, “Mental Birokrasi ‘Asal Hadir’ Dalam Pelayanan Masyarakat Di NTT,” Kompas.id, 2020, diakses pada 24 Maret 2024, pukul 09:57. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/02/mental-birokrasi-asal-hadir-dalam-pelayanan-masyarakat-di-ntt>.

⁵ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, 27.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan Taylor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan.⁶ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau situasi interaksi tertentu, hal ini terkhusus permasalahan birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa buku, jurnal, internet dan pemikiran-pemikiran para filsuf dan para pejabat pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Timur tentang sistem birokrasi dan permasalahan organisasi birokrasi di pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur.

Analisis data yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah reduksi data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Fokus penelitian yang dilakukan adalah tindakan birokrat yang berkenaan dengan prinsip dasar otoritas legal rasional. Penelitian ini mencakupi birokrat dalam bidang struktural dan perangkat daerah NTT yakni; Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kepala pemerintahan tertinggi (Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala desa), para pegawai pemerintahan dan para guru dan elemen aparatur pemerintahan lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Problematika Sistem Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kehadiran pemerintah dalam sebuah negara ditandai dengan adanya masyarakat yang plural dan beraneka ragam, sehingga kehadiran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, dan melindungi masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi sebagai *regulator* dan *services*. Pemerintah secara umum melakukan desentralisasi pemerintahan daerah sebagai jembatan dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara universal. Desentralisasi merupakan suatu pembagian tugas, dalam mempermudah urusan pemerintahan pusat yang berkaitan dengan wewenang dan tugas diserahkan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan bertanggung jawab dengan pemerintahan daerahnya sendiri dan tetap bekerja sama dengan pemerintahan pusat.

Menurut Rondinelli seperti yang dikutip oleh Muhammad Sawir, mengatakan bahwa desentralisasi memiliki keunggulan dalam suatu daerah, yaitu: kebutuhan dan kepentingan Masyarakat lokal dapat dipenuhi dan ditingkatkan, pelayanan yang berkaitan dengan administrasi bisa berjalan lebih fleksibel, inovatif dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan.⁷ Desentralisasi dapat meningkatkan pemerintahan dan yang sangat penting dalam pelayanan dan pembangunan sumber daya dalam

⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda-Karya, 2002), 112.

⁷ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, 17.

meningkatkan profesionalisme pelayanan yang baik dan bersih, administrasi dan kepemimpinan yang lebih baik dan efisien. Pemerintah yang baik akan memberikan dorongan dan aspirasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kemajuan, pelayanan yang baik dan memberikan keadilan, mampu mengatasi segala persoalan dalam Masyarakat, memberikan dorongan dan dukungan bagi kemajuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur pada saat ini memiliki kapasitas kepemimpinan yang kurang baik dalam melayani dan pembangunan sumber daya manusia. Banyak aparatur pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi, terjadinya kasus-kasus pidana dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur masih memiliki mental kerja yang rendah dalam melayani. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang pemerintahan masih memiliki cara kerja dan pola pikir yang instan, yaitu "asal kerja yang penting dapat gaji". Birokrasi atau pemerintahan di mata masyarakat dinilai buruk, lambat, bertele-tele, dan banyak pungutan liar (pungli) yang dilakukan diberbagai elemen lembaga pemerintahan.

Permasalahan yang terjadi dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur juga datang dari masalah-masalah yang sangat empirik yang terkait dengan kebijakan, yaitu:⁸ (1). Kehadiran organisasi daerah yang ditetapkan belum mampu memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Organisasi yang dibentuk malah menjadi beban keuangan bagi daerah, sehingga cenderung "uang keluar bukan untuk pembiayaan urusan daerah tetapi urusan pembayaran operasional pegawai". (2). Gejala pembengkak perangkat daerah yang terjadi akibat tidak dipakainya filosofi dalam pembentukan organisasi. (3). Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam aktivitas rutinitas belaka.

Birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur memiliki kelemahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kelemahan birokrasi pemerintahan daerah NTT, antara lain; komunikasi; komunikasi yang buruk dari perangkat daerah sehingga proyek pekerjaanya menjadi mandek/tidak berjalan, mental birokrasi "asal hadir" hal ini berkaitan dengan perangkat daerah yang kinerjanya tidak jelas dan asal hadir di kantor, standar kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan belum memiliki standar nasional dan internasional, sikap aparatur daerah lebih bersifat memerintah daripada melayani publik, dan peraturan hukum belum berjalan dengan optimal. Perkembangan birokrasi juga mengalami berbagai tantangan dalam roda

⁸ Indriyati, "Reformasi Birokrasi Dalam Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Di Pemprov. NTT," *Jurnal Dialektika* Vol 2, No. (2017): 29, <https://media.neliti.com/media/publications/292545-reformasi-birokrasi-dalam-penataan-kelem-15d444ab.pdf>.

pemerintahan, terkhusus dalam perubahan lingkungan yang strategis dan pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi informasi yang berimplikasi dalam orientasi dan kinerja yang profesional sesuai dengan kinerja dan fungsinya.⁹

Melihat dinamika permasalahan birokrasi ini, menyebabkan pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi termiskin dan terbelakang. Menurut Viktor Laiskodat bahwa masalah utama kegagalan pembangunan di Nusa Tenggara Timur adalah “birokrasi”. Permasalah dinamika birokrasi harus dilakukan rekonstruksi pada fungsi birokrasi pemerintahan yang tepat sasaran dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Joko Widodo seperti yang dikutip oleh Muhammad Sawir, bahwa pemerintahan daerah sebagai agen pembangunan harus kompetitif, adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, perlu manajemen organisasi yang berkualitas agar dapat mewujudkan sasaran kebijakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.¹⁰

B. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT) Yang Berkualitas Dan Berintegritas (*Good Governance*)

Reformasi adalah upaya dalam melakukan suatu penataan yang sistematis, terpadu dan komprehensif, hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan dan merealisasikan tata pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam visi reformasi yang tertera dalam Grand Design Reformasi birokrasi Indonesia adalah “Terwujudnya pemerintahan kelas dunia Tahun 2025”. Visi ini menjadi dasar acuan diberbagai pemerintahan daerah dalam mereformasi birokrasi di setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam reformasi birokrasi pemerintahan terdapat 8 (delapan) sistem perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi adalah suatu konsep rasionalitas dalam bertindak dan bersikap profesionalisme dalam bekerja dan bertindak untuk memperbaharui ide-ide yang dibangun dan itu tidak berhasil. Reformasi birokrasi adalah pencapaian kerja pemerintahan dan itu masih menjadi sebuah ukuran dalam pembangunan suatu negara.¹¹ Reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Dalam reformasi birokrasi pemerintahan yang menjadi sasaran adalah birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, produktif, birokrasi pemerintahan yang transparan, berkualitas dan

⁹ Yudi Rusfiana & Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan* (Bandung: CV ALFABETA, 2021),7.

¹⁰ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, 22.

¹¹ Muhammad Taufik, *Kajian Model Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2014),63.

akuntabilitas dan birokrasi pemerintahan yang desentralisasi.¹² Reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dilatarbelakangi dengan adanya banyak perbaikan dan pembaharuan dalam kinerja aparat pemerintahan dan seluruh aparatur daerah dalam konsep pelayanan public dan pembangunan. Menurut penilaian reformasi birokrasi kementerian PAN RB kepada seluruh Pemerintahan daerah maupun hasil penilaian mandiri tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak perlu perbaikan dalam sistem birokrasi pemerintahan, seperti reformasi birokrasi berupa komponen indeks arsip, pengadaan barang dan jasa, indeks perencanaan, indeks pengelolaan aset, sistem pengelolaan keuangan, tingkat profesionalitas ASN, dan tingkat kepatuhan pelayanan public.¹³ Pemerintahan daerah juga perlu mereformasi birokrasi bidang penegakan hukum dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan transparan.

Langkah-langkah yang harus dibenahi melalui pembaharuan dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur adalah perubahan pola pikir, sikap dan tindak, perubahan kekuasaan menjadi pelayan, perubahan penguasa menjadi pelayan, mendahulukan peranan dari wewenang, tidak memikirkan hasil produksi tetapi hasil akhir, perubahan manajemen kinerja. Selain itu, dilakukan penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. birokrasi Reformasi birokrasi memiliki suatu cita bahwa pemerintahan menjadi baik dan bersih dalam pelayanan public, pemerintahan yang profesional dan juga bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).¹⁴

Reformasi birokrasi memiliki tujuan utama, yaitu; untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *good governance*. Good governance yang berkualitas dan profesionalisme, adanya kepastian hukum, sikap terbuka dan transparansi, bersikap terbuka dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Prof. Prijono, menyatakan bahwa reformasi birokrasi memiliki tujuan, yakni dapat menghasilkan pemimpin yang jiwa pelayan responsive, professional dan netral dalam kebijakan, dengan tujuan untuk meningkat kepercayaan kepada Masyarakat dalam pelayanan.¹⁵ Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dalam pemerintahan untuk membuka paradigma dan proses pembaharuan dalam meningkatkan kinerja birokrat yang berkualitas dan berintegritas.

¹² Yudi Rusfiana & Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*, 167.

¹³ Darius Beda Daton, "Birokrasi Bersih Melayani," *Kabar Perwakilan*, 2022, diakses pada 24 Maret 2024, pukul 19:16. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--birokrasi-bersih-melayani>.

¹⁴ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, 30.

¹⁵ Ane Permatasri, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 159.

Problematisa birokrasi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur harus diperhatikan secara serius dalam meningkatkan kualitas dan kinerja para birokrat. Menurut Togar Silaban seperti yang dikutip oleh Ane Permatasari ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah, yaitu:¹⁶ (1). Reformasi mental individu oleh para birokrat dalam meningkatkan kualitas kerja, (2). Melakukan reformasi birokrasi bagi para aparatur profesional, (3). Reformasi birokrasi secara menyeluruh dalam bidang pemerintahan guna meningkatkan dan manfaat pelayanan masyarakat, (4). Bekerja sama dengan berbagai mitra dalam meningkatkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintah, (5). Reformasi birokrasi harus memiliki dukungan yang besar secara politik. Dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mencapai tujuan birokrasi yang berkualitas dan berintegritas, berdasarkan peraturan Menpan Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi, menuju birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang akuntabel, dan birokrasi yang transparan.

C. Implikasi Teori *Rational Administrative Model* Terhadap Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Timur (NTT)

Teori *Rational Administrative* adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog klasik yang sangat terkenal dengan pemikiran tentang “tipe ideal birokrasi”. Konsep tipe ideal birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber adalah sebuah tipe birokrasi organisasi yang disusun dan dirancang menjadi lebih efisien dari suatu fenomena. Teori *Rational Administrative Model* merupakan suatu model yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan kharisma.¹⁷ Birokrasi peraturan yang rasional yang dimaksud disini adalah sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien.

Birokrasi model ini memiliki sistem kerja yang terorganisir yang struktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, menurut Max Weber organisasi merupakan sarana dalam mencapai tujuan dan birokrasi menjadi salah satu tipe ideal dalam suatu organisasi. Ciri-ciri birokrasi tipe ideal menurut Max Weber, seperti yang dikutip oleh Muhammad adalah¹⁸

1. Prinsip Pembagian Kerja

¹⁶ Ane Permatasari, *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*, 164.

¹⁷ Suhardiman, dkk, *Birokrasi & Public Governance* (Samarinda: CV Thata Media Group, 2023), 6.

¹⁸ Muhammad, *Birokrasi: Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 14-15.

Pembagian kerja harus jelas dalam sebuah organisasi. Setiap individu dalam organisasi harus memiliki tugas yang jelas dan pembagian tugas berdasarkan tenaga-tenaga spesialis dalam setiap jabatan.

2. Prinsip Struktur Hirarki

Pengorganisasi mengikuti prinsip hirarki, yaitu mulai dari tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun sebuah birokrasi yang struktur dan runtun dalam sebuah organisasi.

3. Sistem Penerimaan dan Penempatan Karyawan

Sistem penerimaan dan penempatan karyawan di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada karier. Dilakukan dengan sistem promosi, atau atas dasar senioritas atau prestasi, serta kedudukan dalam sebuah organisasi.

4. Prosedur dan Aturan dalam Organisasi

Sistem prosedur dan aturan dalam organisasi dilakukan secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk penyeragaman dalam setiap tugas yang diberikan.

5. Netralitas dalam Birokrasi (Tidak Memihak)

Pejabat yang ideal dalam birokrasi melakukan kewajiban dengan semangat, tanpa ada rasa simpati dan empati terhadap rekan kerja. Menurut Max Weber setiap individu yang memegang suatu jabatan harus melakukan tugasnya secara objektif, tidak menggunakan jabatan untuk melayani diri sendiri dan kelompoknya.

6. Birokrasi yang Transparan

Dalam menjunjung tinggi efisiensi organisasi birokrasi yang baik dan murni, maka aktivitas administrasi dan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan harus dilakukan dengan bentuk tertulis. Hal ini menunjukkan birokrasi yang lebih jelas dan efisien, efektivitas dan transparan.

Teori Rational Administrative Model menjadi sangat efektif dalam merealisasikan dan penerapan dalam pembangunan sistem birokrasi yang berkualitas dan berintegritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sistem pemerintahan daerah NTT harus melakukan pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi dan anggota organisasi mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dalam penerimaan dan penempatan jabatan atau karyawan harus didasarkan pada kemampuan teknis, spesialis di bidang kemampuannya, dan tanpa memperhatikan hubungan keluarga, favoritisme, atau rasa simpati dan empati. Sistem birokrasi pemerintahan daerah NTT masih lemah dalam kinerja dan penegak hukum, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam menata dan meningkatkan kinerja yang baik, berkualitas dan akuntabilitas.

Teori Rational Administrative Model menjadi sangat relevan dalam membangun sistem birokrasi pemerintahan NTT yang baik dan berkualitas dan berintegritas (*good governance*). Prasajo dan kurniawan mengatakan bahwa *good governance* meliputi pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum (aturan), transparansi, akuntabilitas,

reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan.¹⁹ Good governance memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu *economic governance*, *political governance*, and *administrative governance*.²⁰ Oleh karena itu, demi mewujudkan pelayanan dalam mensejahterakan rakyat perlu dilakukan peningkatan dan rehabilitas di berbagai bidang berupa komponen indeks arsip, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset secara baik dan efisien, pengelolaan keuangan secara transparan, meningkatkan profesionalitas ASN dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang optimal dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Teori Rational Administrative Model menjadi salah satu model dalam mewujudkan *good governance* dalam sebuah pemerintahan. Ciri-ciri tipe ideal organisasi birokrasi Max Weber diatas menjadi landasan dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan daerah NTT yang baik dalam melayani rakyat. Menurut David Boaz seperti yang dikutip oleh Yudi Rusfiana & Cahya Supriatna adalah bahwa esensi fungsi dari pemerintahan yakni semangat memimpin, mengayomi, dan mendukung kepentingan publik. melayani rakyat.²¹

III. KESIMPULAN

Birokrasi pemerintahan daerah Provinsi NTT mengalami penurunan dan menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat kepada pemerintah karena terjadi banyak kasus-kasus pidana, tindakan korupsi, atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Permasalahan birokrasi juga dating dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, profesionalitas ASN yang menurun, dan penegakan hukum yang masih lemah dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. Melihat hal ini, perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam menata dan meningkatkan kinerja yang berkualitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan model Birokrasi Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berkualitas dan berintegritas, maka pemerintahan daerah harus melakukan reformasi birokrasi di setiap bidang elemen pemerintahan, seperti penataan kelembangaan yang baik, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan pemerintahan yang bersih dan baik, pemerintahan yang profesionalitas, dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Selain itu harus memperhatikan dimensi-dimensi tipe ideal birokrasi yang ditawarkan oleh Max Weber dalam teori rational administrative model, yaitu prinsip pembagian kerja, prinsip struktur hirarki, sistem penerimaan dan penempatan karyawan, prosedur dan aturan dalam organisasi, netralitas dalam birokrasi (tidak

¹⁹ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: Unsrat Press, 2017), 71.

²⁰ *ibid*, 71-72.

²¹ Yudi Rusfiana & Cahya upriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*, 32.

memihak), dan birokrasi yang transparan. Teori Rational Administrative Model menjadi salah satu model dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Daton, Darius Beda. "Birokrasi Bersih Melayani." *Kabar Perwakilan*, 2022. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--birokrasi-bersih-melayani>.
- Ekatjahjana, Widodo. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2022.
- Indriyati. "Reformasi Birokrasi Dalam Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Di Pemprov. NTT." *Jurnal Dialektika* Vol 2, No. (2017): 29. <https://media.neliti.com/media/publications/292545-reformasi-birokrasi-dalam-penataan-kelem-15d444ab.pdf>.
- Kornelis Kewa Ama. "Mental Birokrasi 'Asal Hadir' Dalam Pelayanan Masyarakat Di NTT." *Kompas.id*, 2020. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/02/mental-birokrasi-asal-hadir-dalam-pelayanan-masyarakat-di-ntt>.
- Mangindaan, Joanne V. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Manado: Unsrat Press, 2017.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda-Karya, 2002.
- Muhammad. *Birokrasi: Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Permatasri, Ane. *Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, 2020.
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Suhardiman, Dkk. *Birokrasi & Public Governance*. Samarinda: CV Thata Media Group, 2023.
- Supriatna, Yudi Rusfiana & Cahya. *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung: CV ALFABETA, 2021.
- Taufik, Muhammad. *Kajian Model Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2014.

*This page
intentionally left*